

**SISTEM PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH RIAU TERHADAP
ISI SIARAN TV LOKAL DI RIAU**

© Hak cipta milik U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

SRI LESTARI
NIM. 11543200615

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SISTEM PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU TERHADAP TV LOKAL DI RIAU

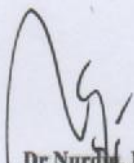
Disusun Oleh:

Nama: SRI LESTARI

NIM: 11543200615

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 06 November 2019

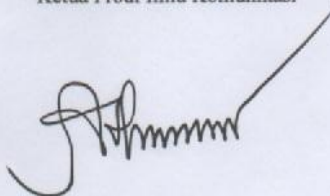
Pembimbing



Dr. Nurdin, MA

NIP.1966062012006041015

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si

NIP.196911181996032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Isi Siaran Tv Lokal di Riau"* yang ditulis oleh:

Nama : Sri Lestari
Nim : 11543200615
Jurusan : Ilmu Komunikasi (Broadcasting)

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Desember 2019

Dan disetujui sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Dekan

Dr. Nurdin, MA
NIP. 9660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Nurdin, MA
NIP. 9660620 200604 1 015

Sekretaris/Penguji II

Muhlisin, S.Pd, M.Pd. I
NIP.19680513 200501 1 009

Penguji III

Rafdeadi, S.Sos.I, MA
NIP. 19821225 201101 1 011

Penguji IV

Mardhiah Rubani, M.Si
NIP. 19790302 200701 2 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SISTEM PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU TERHADAP TV LOKAL DI RIAU

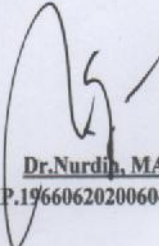
Disusun Oleh:

Nama: SRI LESTARI

Nim: 11543200615

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 06 November 2019

Pembimbing



Dr. Nurdin, MA
NIP.196606202006041015



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lestari
 NIM : 11543200615
 Tempat/ Tanggal Lahir : Balam Sempurna, 22 Desember 1997
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : **Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Tv Lokal di Riau**

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2019

Yang membuat pernyataan,



SRI LESTARI
NIM.11543200615

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Nurdin, MA

Pekanbaru, November 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (Eksempler) Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Sri Lestari

Nim : 11543200615

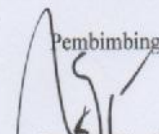
Judul : "Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Tv Lokal di Riau"

Telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Komunikasi dalam bidang Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing 1

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**THE SUPERVISION SYSTEM OF LOCAL INDONESIAN
BROADCASTING COMMISSION OF (KPID) RIAU ON
BROADCASTING CONTENT OF LOCAL
TELEVISION IN RIAU**

SRI LESTARI
11543200615

This study aims to know how is the Riau KPID supervision system on the contents of local TV broadcasts in Riau. This study uses a qualitative descriptive research method using Miles and Huberman's data analysis theory in which the data obtained come from interviews, Riau KPID documents, and observation. The results of the study show that, first, the contents of a good broadcast are in accordance with Law No.32 of 2002 and the Broadcast Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards for 2012, but there are still violations committed though classified as minor violations. Secondly, methods of supervision conducted by the Riau KPID on Local TV are the direct supervision method, namely by monitoring directly from the Riau KPID monitoring tool carried out by the monitoring team, and the indirect monitoring method by accepting public complaints and carrying out supervision based on Standard Operating Procedures (SOP). Thirdly, to monitor the duration and pattern of Local TV broadcasts in Riau requires every local TV in Riau to register its program that will be broadcast at the station to the licensing agency at Riau KPID to obtain broadcasting permission. Fourthly, monitoring facilities used by KPID Riau in monitoring Local TV include surveillance rooms, monitoring devices accompanied by recording and monitoring devices, website www.kpidriau.go.id and social media like email, twitter, facebook, instagram, SMS and whatshap. Fifthly, the KPID Riau gives KPID awards every year as a form of appreciation to Local TV in Riau. In addition, the KPID also sanctioned Local TV that violated broadcast contents in accordance with the provisions of the Broadcasting Law No.32 of 2002 and P3SPS. The supervision system of Riau Regional Indonesian Broadcasting Commission for Local TV Broadcast Content in Riau uses direct supervision and indirect supervision. To run its supervision, the KPID Riau uses the steps in accordance with Operational Standards Procedure (SOP) of monitoring broadcast content.

Keywords: Monitoring System, Broadcast Content

ABSTRAK

SISTEM PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU TERHADAP ISI SIARAN TV LOKAL DI RIAU

SRI LESTARI
11543200615

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan KPID Riau terhadap isi siaran tv lokal di Riau. Penelitian ini menggunakan metode riset deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori analisis data Miles dan Huberman dimana data yang diperoleh berasal dari wawancara, dokumen KPID Riau, dan hasil dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* isi siaran yang baik sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Tahun 2012, namun masih ada pelanggaran yang dilakukan tetapi tergolong kepada pelanggaran yang ringan. *Kedua* Metode pengawasan yang dilakukan KPID Riau terhadap Tv Lokal menggunakan metode pengawasan langsung yaitu dengan memantau langsung dari alat pemantau KPID Riau yang dilakukan oleh tim pemantau, dan menggunakan metode pengawasan tidak langsung yaitu dengan menerima aduan masyarakat dan dalam melakukan pengawasan KPID Riau mengikuti langkah-langkah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). *Ketiga* KPID Riau dalam mengawasi durasi dan pola siaran Tv Lokal di Riau mengharuskan Tv Lokal di Riau mendaftarkan setiap acara yang akan ditayangkan distasiun tersebut kepada lembaga perizinan yang ada di KPID Riau untuk mendapatkan izin siar. *Keempat* sarana pengawasann yang digunakan KPID Riau dalam mengawasi Tv Lokal antara lain ruangan pengawasan, alat pemantau yang disertai dengan alat perekam dan monitor dan juga melalui situs website www.kpidriau.go.id dan media sosial email, twitter, facebook, instagram, SMS dan whatshap *Kelima* KPID Riau memberikan KPID *award* setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi kepada Tv Lokal di Riau. Disamping itu KPID juga memberikan sanksi bagi Tv Lokal yang melakukan pelanggaran isi siaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU Penyiaran No.32 tahun 2002 dan P3SPS. Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Isi Siaran Tv Lokal di Riau dilihat dari aspek yang diamati yaitu Pelaksanaan Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Isi Siaran menggunakan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dan dalam melakukan pengawasan KPID Riau mengikuti langkah-langkah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemantau isi siaran.

Kata Kunci: Sistem Pengawasan, Isi Siaran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala kata tulus sebagai puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S1). Shalawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Skripsi dengan judul **“SISTEM PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU TERHADAP ISI SIARAN TV LOKAL DI RIAU”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menerima kritik, saran, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Terimakasih untuk Ayahanda tercinta PONIMAN dan Ibunda tercinta SUJINAH serta Suami ku Tercinta RAMLAN SAHPUTRA HASIBUAN yang selalu mendo'akan, memberi motivasi, serta memberi dukungan baik secara moriil dan materiil sehingga ananda dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin S.Ag M.Ag.
3. Bapak Dr. Nurdin M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

M.Ag, Dr. Toni Hartono M.Si dan Dr. Azni M.Ag selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4 Ibu Dra. Atjih Sukaesih M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Bapak Dr. Nurdin M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini

6 Bapak Drs. Suhaimi. D,M.Si selaku Penasehat Akademik. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.

7. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.

Jazakumullah Khairan Katsiran, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi melengkapi kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, Januari 2020
Penulis,

SRI LESTARI
NIM. 11543200615

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Validitas Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB VI GAMBARAN UMUM	34
A. Dasar Pembentukan KPID Riau	34
B. Visi KPID Riau	37
C. Misi KPID Riau	38
D. Struktur Organisasi KPID Riau	38

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

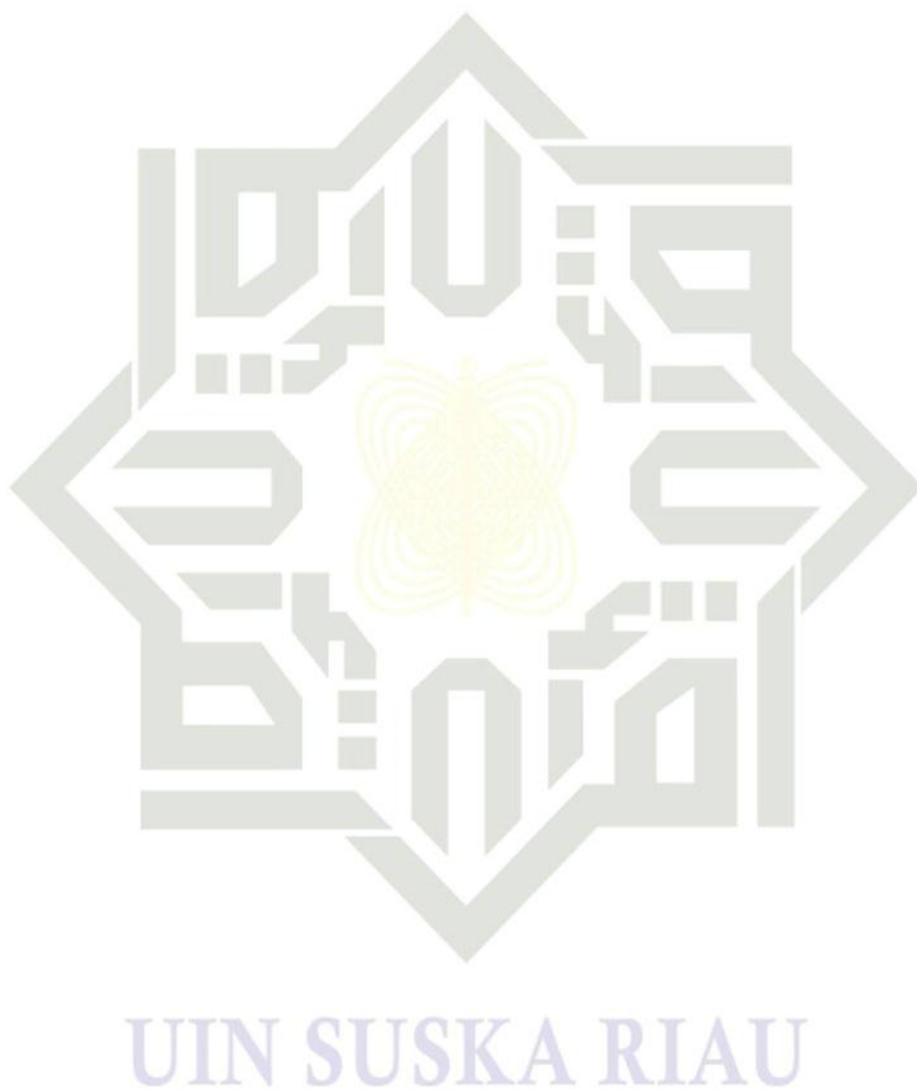
ABSTRAK	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	53
BAB VI PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	

Hak Cipta Berhimpun-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

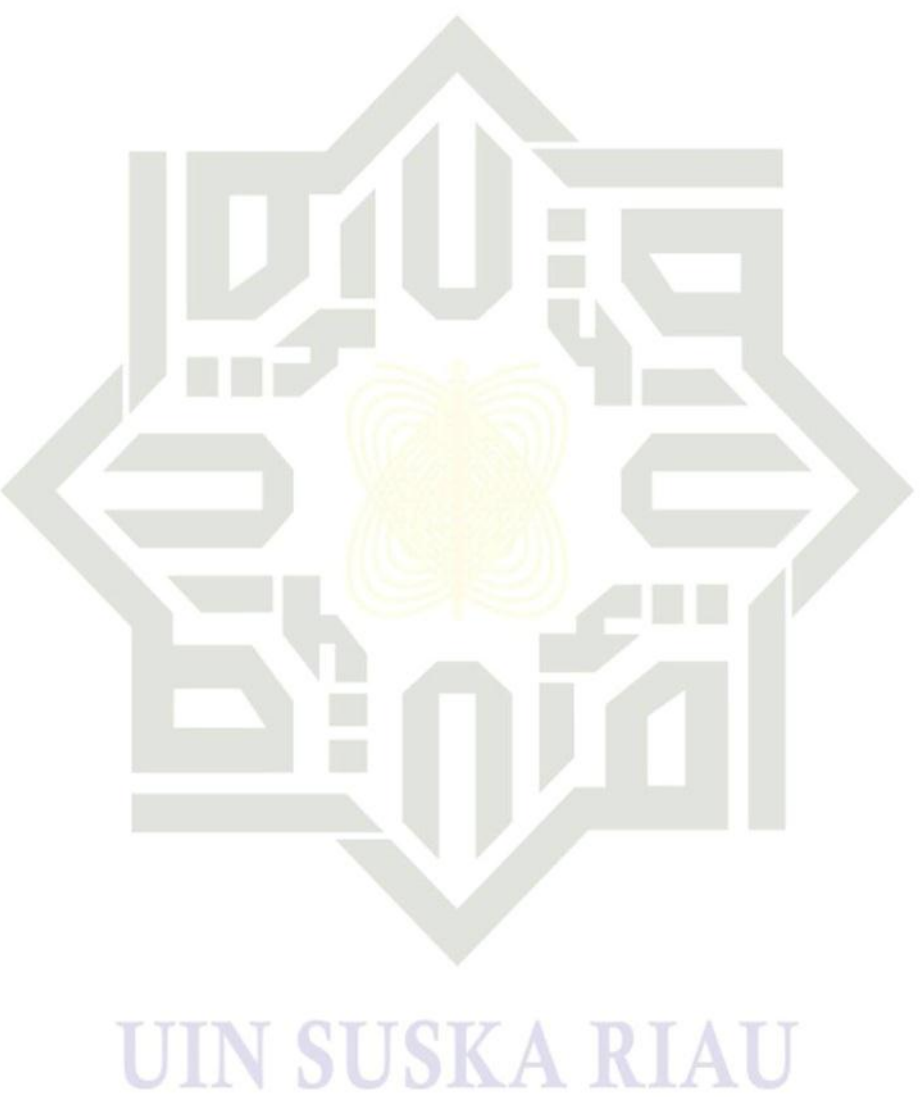
abel 1.1	Nama-nama TV Lokal di Riau	4
abel 1.2	Daftar Pelanggaran Tahun 2018-2019	6
abel 5.1	Daftar Informan Penelitian Primer	42
abel 5.2	Daftar Informan Penelitian Sekunder	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1	Komisioner KPID Riau periode ketiga tahun 2017-2020 .	35
Gambar 4.2	Logo KPID Riau)	37
Gambar 4.3	Struktur Organisasi KPID Riau	41
Gambar 5.1	Nomor Pengaduan KPID Riau	46
Gambar 5.2	Pemantau Isi Siaran KPID Riau	46
Gambar 5.3	Rapat Pleno Komisioner.....	49
Gambar 5.4	Alat Pemantau dan KPID Riau.....	50
Gambar 5.5	Petugas Pemantau KPID Riau	50
Gambar 5.6	KPID Riau Award	52
Gambar 5.7	Surat Pemanggilan KPID Riau atas Pelanggaran Salah Satu Program Tv Lokal	59
Gambar 5.8	Form temuan KPID Riau	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian dari satu sumber kepada khalayak yang berjumlah besar, dengan menggunakan saluran media massa. Seperti yang dikemukakan oleh Bittner yaitu komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa pada sejumlah orang.¹ Dapat diketahui dari definisi tersebut bahwa komunikasi massa harus menggunakan media massa dan jika sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang berjumlah banyak tetapi tidak menggunakan media massa maka itu bukan media massa. Seperti yang dikutip Blake dan Haroldsen membagi lima unsur yang terdapat pada komunikasi massa, yaitu komunikator, khalayak, saluran, dan efek.²

Diera modern dan globalisasi yang sangat pesat saat ini komunikasi massa berkembang sangat pesat yang dulunya hanya dibaca seperti koran, majalah sekarang dapat didengar bahkan dilihat seperti televisi. Pertama kali televisi ditemukan pada akhir abad 19 dengan berbagai eksperimen yang dilakukan oleh James Clark Maxwell, Heinrich Hertz dan Marconi pada tahun 1890. Di Indonesia televisi dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-17 tahun.³ Dunia pertelevisian menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan informasi, berita, pengetahuan, dan hiburan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya generasi muda saja tentunya anak-anak dan juga orang tua butuh hiburan untuk masing-masing usia. Sebagai negara yang mempunyai tujuan untuk mencerdaskan masyarakat bangsa Indonesia, tentunya Indonesia harus berbenah di segala bidang termasuk di bidang penyiaran khususnya pertelevisian.

¹ Elvinaro Ardianto dkk. *Komunikasi Massa* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007)

² Zulkarnaen Nasution. *Sosiologi Komunikasi Massa* (Solo: Pustaka Iltizam, 2014) 6

³ Morissan. *Manajemen Media Penyiaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008) 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Televisi sangat berkembang pesat menempati kebutuhan penting bagi masyarakat dan pers fungsinya sebagai komunikasi massa. Munculnya televisi sebagai media komunikasi massa memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Ma'at acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, dan perasaan para penonton.⁴ Dalam perkembangannya banyak bermunculan televisi-televisi yang berlomba-lomba menyajikan program unggulan untuk mendapatkan *rating* tinggi dan bahkan tidak memperhatikan isi dari siarannya. Isi siaran televisi harus mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan harus bermanfaat dalam pembentukan intelektualitas, watak dan moral. Dominick menyebutkan tentang dampak komunikasi massa pada pengetahuan, persepsi dan sikap orang-orang, terutama televisi yang menjadi agen sosialisasi memainkan peranan penting dalam transmisi sikap, persepsi dan kepercayaan.⁵ Maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya. Didalam buku Onong yang berjudul *Dinamika Komunikasi* disebut revolusi elektronik dimana sebuah produk telah memanipulasikan keinginan khalayak, tetapi tidak menciptakan cara-cara untuk memperolehnya. Informasi yang yang disebarkan oleh media massa elektronik terutama dilancarkan dari atas kebawah, dari kaum elite ke masa khalayak, dari kota kedesa dan dari yang sudah berkembang ke sedang berkembang.⁶

Menurut regulasi penyiaran di Indonesia terdapat 4 jenis penyiaran:⁷

1. Penyiaran swasta

Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang menjalankan usaha penyiaran berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Lembaga ini menjual usaha berupa waktu tayang iklan dan usaha lain yang sangat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

⁴ Onong Uchjana Effendy. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosda, 2017) 80

⁵ Elvinaro Ardianto dkk. *Komunikasi Massa* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007) 59

⁶ Onong Uchjana Effendy. *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda, 2006) 41

⁷ Devikharism, "4 Jenis Penyiaran Indonesia". Dalam <https://devikharism.wordpress.com/2015/02/25/4-Jenis-Penyiaran-Indonesia/>. (diakses 10 maret 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Penyiaran Publik

Penyiaran publik adalah diakuinya supervisi dan evaluasi publik pada level yang signifikan. Publik disini dibaca sebagai warganegara. Bagi penyiaran publik, iklan bukanlah sesuatu yang haram. Tergantung bagaimana public ikut menentukan berapa pembatasan penayangan iklan perjamnya dan iklan-iklan mana yang dianggap pas bagi penyiaran publik.

3. Lembaga penyiaran komunitas

Penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara independen, daya pancar rendah, jangkauan wilayah yang terbatas, tidak komersial, serta melayani komunitas.

4. Lembaga penyiaran berlangganan

Lembaga penyiaran berlangganan adalah bentuk penyiaran yang memancarluaskan atau menyalurkan materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia atau media informasi lainnya. Dalam memancarluaskan siarannya lembaga penyiaran berlangganan dapat menggunakan satelit kabel atau melalui teresterial.

Di dalam UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran juga diatur pasal tentang isi siaran yaitu pasal 35 dan 36 jadi sangat diharapkan bahwa lembaga penyiaran mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, tetapi kenyataannya masih banyak lembaga penyiaran yang melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama.

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2002 ini terdapat 5 tujuan penyiaran:⁸

1. Untuk memperkuat integrasi nasional.
2. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Memajukan kesejahteraan umum.
5. Menumbuhkan industry penyiaran Indonesia.

⁸ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengawasan penyiaran, Riau memiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran yang ada di daerah Riau itu sendiri. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang:⁹

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah, lembaga siaran dan masyarakat

KPID Riau mengawasi penyiaran baik itu siaran radio maupun siaran TV lokal. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada siaran TV lokal. Adapun nama-nama TV Lokal yang ada di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

No	Nama TV Lokal	Alamat
1	Labschool TV	Kota Pekanbaru
2	Riau TV	Kota Pekanbaru
3	Esa TV Riau	Kota Pekanbaru
4	Riau Channel	Kota Pekanbaru
5	Rohil TV	Rokan Hilir
6	Rohul TV	Rokan Hulu
7	Gemilang TV	Kabupaten Indragiri Hilir
8	Andalas TV	Kabupaten Indragiri Hilir
9	Srijunjung TV	Bengkalis
10	Siak TV	Kabupaten Siak
11	Spot TV	Kabupaten Siak
12	RTV Pekanbaru	Kota Pekanbaru

Sumber: KPID Riau (2019)

⁹ Ibid

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa ada 12 TV Lokal yang terdapat di Provinsi Riau yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota. Untuk mempermudah pemantauan siaran TV lokal tersebut, KPID menggunakan perangkat pemantauan siaran, hal ini akan mempermudah tugas pengawasan KPID Riau terhadap isi siaran di Tv lokal yang ada di Provinsi Riau sehingga KPID Riau mendapatkan bukti dari alat perekam dan pemantauan tersebut. Namun sebelum digunakan perangkat pemantauan, pemantauan terhadap isi siaran hanya dilakukan secara langsung dan mengandalkan aduan dari masyarakat.

Berdasarkan data dari KPID Riau, masih ada siaran TV lokal yang melanggar berbagai aturan seperti penampilan busana wanita yang tergolong porno aksi, pernyataan atau sebuah perkataan yang tak etis, serta berbagai pelanggaran iklan. Selama beberapa tahun terakhir KPID Riau telah melayangkan sejumlah teguran kepada penyiaran TV lokal yang ada di Provinsi Riau. Berikut adalah tabel pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa stasiun Tv Lokal yang ada Riau periode 2018-2019 :

NO	Tanggal	Pelanggaran
1	16 Mei 2018	RTv menayangkan iklan ucapan selamat ramadhan oleh ke empat calon pasangan pilkada Riau, hal ini melanggar surat edaran dari KPID Riau tentang isi siaran masa pilkada 2018.
2	23 Juni 2018	Saat siaran langsung debat terbuka kualitas penayangan siaran langsung yang ditayangkan oleh RTv tidak bagus, hal ini membuat masyarakat tidak memperoleh siaran dan informasi yang layak sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 Pasal 8 tentang penyiaran.
3	29 Mei 2019	Saat bulan ramadhan Andalas Tv menayangkan film berunsur porno pada waktu siang hari.
4	17 Juli 2019	RTv menayangkan Program Ongol-ongol yang didalam program tersebut terdapat seorang pria yang memegang rokok tanpa disensor, hal ini melanggar UU No.32 Tahun 2002 pasal 21 ayat 1 dan pasal 18 SPS 27(2.a)

Sumber: KPID Riau 2018-2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk meminimalisir terjadinya isi siaran Tv Lokal yang tidak sehat sebagai konsumsi hiburan dan informasi bagi masyarakat maka peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dituntut untuk lebih berperan aktif dalam mengawasi isi siaran Tv Lokal di Riau, salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu memiliki sistem pengawasan yang jelas agar pengawasan isi siaran Tv Lokal di Riau berjalan dengan lancar.

Sistem itu sendiri merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Sedangkan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹¹ Maka sistem pengawasan KPID Riau itu sendiri terdiri dari Koordinasi pemantauan, Tim Analisis, Koordinasi Bidang Isi Siaran.

Untuk itu TV lokal harus melakukan sensor terhadap isi siarannya. Sensor terhadap isi siaran sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf A Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.¹² Adapun sanksi apabila sensor internal ditiadakan terhadap siaran yang ada unsur seksual dan kekerasan yakni ancaman sanksi terkait peniadaan sensor internal terhadap konten kekerasan dan seksual sesuai yang tertulis dalam pasal 55 UU Penyiaran, yaitu segala tindakan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pasal 20, pasal 23, pasal 24, pasal 26 ayat (2), pasal 27, pasal 28, pasal 33 ayat (7), pasal 34 ayat (1) huruf A, huruf D, huruf F, pasal 36 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), pasal 39 ayat (1), pasal 43 ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) UU Penyiaran akan dikenai dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud antara lain:¹³

¹⁰ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (CV ANDI OFFSET: Yogyakarta, 2016) 7

¹¹ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab* (Jakarta: Sinar Grafika 1990) 17

¹² Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, Bab 3, Pasal 26

¹³ *Ibid.* Bab 8, Pasal 55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teguran secara tertulis
2. Siaran yang dalam kasus tersebut dihentikan sementara
3. Durasi siaran dibatasi, pengenaan denda administratif
4. Kegiatan siaran dibekukan
5. Tidak ada izin perpanjangan penyiaran lagi dan izin siaran dicabut

Berdasarkan perihal di atas tersebut penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti tentang Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap isi TV lokal yang ada di Provinsi Riau. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena KPID Riau merupakan satu-satunya lembaga yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Provinsi Riau serta KPID Riau memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran standar isi siaran.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Isi Siaran Tv Lokal di Riau” agar lebih mudah dalam memahaminya maka perlu diberi penjelasan terhadap istilah-istilah judul penelitian diatas.

1. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan merupakan cara atau usaha yang secara teratur dilakukan untuk memeriksa, mencocokkan dan mengusahakan agar kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.¹⁴

2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁴M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)12-13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri.¹⁵

Komisi Penyiaran Indonesia yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang beralat di Jl. Gajah Mada Simpang Empat Kota Pekanbaru tentang bagaimana sistem pengawasannya dalam isi siaran tv berlangganan melalui kabel di Riau.

Isi Siaran

Menurut UU Nomor 32 tahun 2002 siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Isi siaran itu sendiri diatur dalam UU nomor 32 tahun 2002 Bab 4 pasal 36.¹⁶

Isi siaran yang dimaksud UU Nomor 32 tahun 2002 harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran yang telah ditetapkan oleh komisi penyiaran Indonesia.

7. Tv Lokal

Televisi lokal adalah stasiun penyiaran yang memiliki wilayah siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten. Undang-undang penyiaran menyebutkan, bahwa stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah Republik Indonesia dengan jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut. Tv lokal cenderung menampilkan dan mengedepankan permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Selain pemakaian bahasa, dalam isi pemberitaan juga program acaranya Tv lokal terfokus membahas permasalahan lokal daerah masing-masing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan perumusan masalah yaitu sebagai berikut

¹⁵ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). *Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002*

¹⁶ Ibid, Bab 4, Pasal 36

Bagaimana Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap isi siaran Tv Lokal di Riau ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengawasan KPID Riau terhadap isi siaran tv lokal di Riau.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

Secara akademis yaitu, untuk memberikan kontribusi mengenai KPID Riau dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran tentang tayangan-tayangan yang layak dan kurang layak di televisi.

Secara praktis yaitu, diharapkan dapat bermanfaat bagi peminat studi penyiaran sebagai bahan bacaan ketika menjawab permasalahan penyiaran televisi.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah penulisan membuat sistematika penulisan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknis analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

BAB V

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

: GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum lokasi penelitian meliputi KPID Riau, Visi dan Misi serta tujuan KPID Riau.

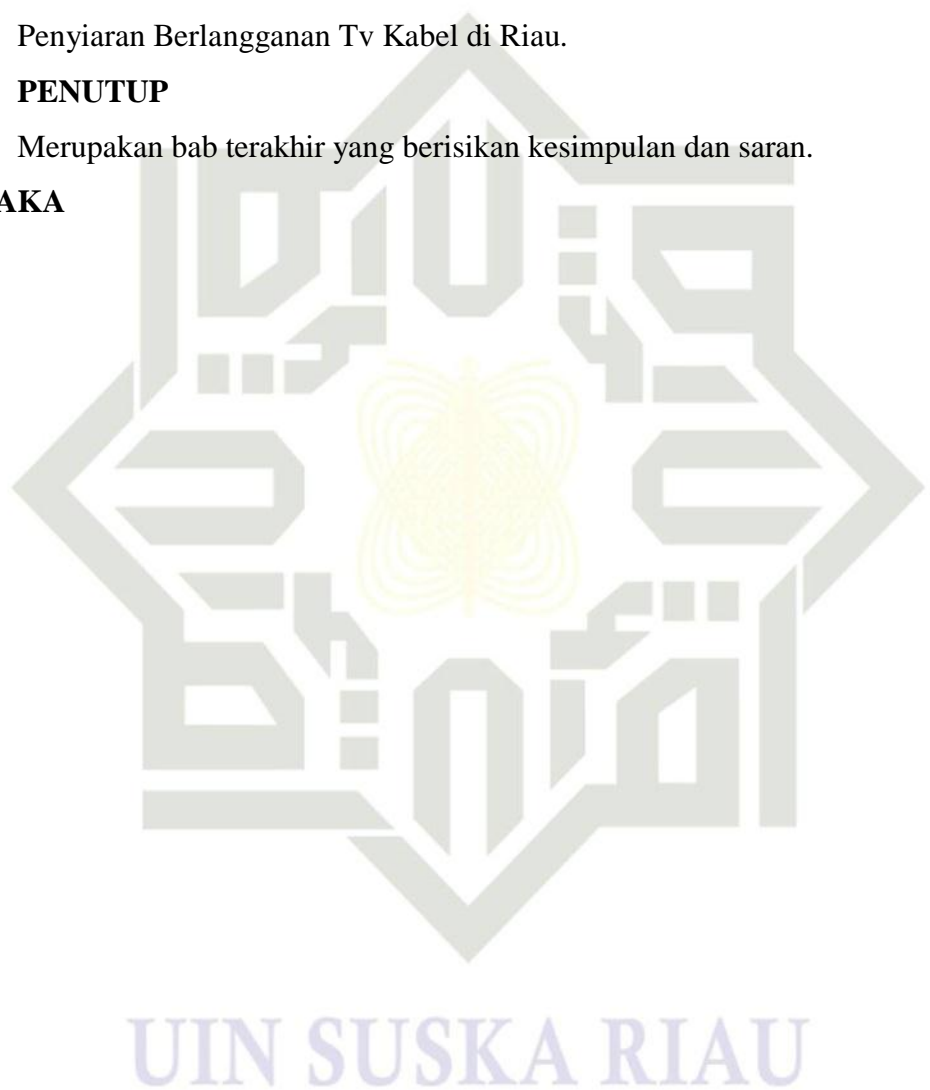
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Sistem Pengawasan KPID Riau terhadap Isi Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Tv Kabel di Riau.

: PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Kajian Teori

Sistem Pengawasan

a. Pengertian Sistem Pengawasan

Sistem merupakan perangkat elemen-elemen yang saling berhubungan atau perangkat variabel-variabel yang mandiri.¹⁷ Serta perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁸ Adapun Pengertian sistem *pertama*, adalah suatu kebetulan yang kompleks atau terorganisasi, himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kebulatan (keseluruhan) yang kompleks atau utuh. *Kedua*, sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. *Ketiga*, sistem merupakan himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasi dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁹

Masduki mengutip teori dari *David Easton* tentang sistem yaitu " *A System Analisis Of Political Life* " yang menjelaskan seluruh interaksi mengakibatkan terjadinya pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Sistem sering kali digambarkan dengan prosedur, dimana memiliki pengertian bahwa penyelenggaraan yang teratur atas kegiatan yang saling terkait. Jadi prosedur adalah serangkaian langkah yang harus ditempuh dalam memenuhi, mengendalikan, dan menyelesaikan berbagai kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang.²⁰

Menurut sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan

¹⁷ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah* (Surabaya :CV. Putera Media Nusantara, 2009) 101.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 1076

¹⁹ Sarbini, Neneng Lina. *Perencanaan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) cet. 1.25

²⁰ Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal* (Yogyakarta: LKIS, 2007) 3

tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²¹ Pengawasan berhubungan dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang telah direncanakan, pengawasan bertujuan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Tetapi pengawasan itu sendiri bertujuan untuk mencari kebenaran terhadap hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.

Dalam Teori Pengawasan Organisasi oleh Philip Tompkins dan George Cheney memberikan gagasan bahwa teori mengenai komunikasi organisasi dalam tradisi sosiokultural tidak terlalu memberikan perhatian pada jaringan hubungan dalam individu anggota tetapi lebih terfokus pada makna bersama dan interpretasi yang dibangun atau dikonstruksikan dalam jaringan,serta implikasi dari makna bersama dan interpretasi tersebut bagi kehidupan organisasi.²²

b. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Yohannes Yahya, pengawasan terdiri dari²³:

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi

Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

Pengawasan preventif

²¹ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990)17

²² Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) 435.

²³ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.

4) Pengawasan Represif

pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Philip Tompkins dan George, organisasi yang menggunakan kontrol terhadap anggotanya melalui empat cara yaitu :²⁴

1) Pengawasan Sederhana

Yang dimaksud dengan pengawasan sederhana (*Simple Control*) yaitu yang menggunakan kekuasaan serta langsung dan terbuka.

2) Pengawasan Birokratis

Pengawasan birokratis (*bureaucratic control*) yaitu pengawasan yang melalui beberapa prosedur dan aturan-aturan formal.

3) Pengawasan Konsertif

Menurut Cheney dan Tompkins, cara keempat merupakan metode pengawasan yang menarik karena pengawasan ini menggunakan hubungan interpersonal dan kerjasama diantara anggota organisasi atau karyawan sebagai alat untuk melakukan kontrol.

Agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :²⁵

1) Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.

2) Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan melalui bawahannya melalui tulisan dan lisan.

²⁴ Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) 75.

²⁵ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) 33.

c. Tahap-Tahap Proses Pengawasan

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, tahap-tahap proses pengawasan sebagai berikut²⁶:

1) Tahap 1: Penetapan standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.

2) Tahap 2 : Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3) Tahap 3 : Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.

4) Tahap 4: Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau sebagai Regulator Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga Negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran, yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan dan hadir sebagai peran serta masyarakat dan berfungsi melayani aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan peranannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan

²⁶ Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar – Dasar Manajemen Edisi 5*, (Yogyakarta: BPFE, 1992) 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah Sembilan (9) orang sedangkan untuk KPID berjumlah tujuh (7) orang. Adapun pendanaannya, KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan KPID berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dasar utama pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal yang mencakup tentang asas, tujuan, fungsi, dan ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran juga di atur dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Adapun tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar-benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- e. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sebagai wujud peran serta masyarakat KPI diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat (2) yakni :²⁸

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran

²⁷ KPI. <https://www.kpi.go.id/index.php/dasar-pembentukan> (diakses pada tanggal 20 Januari 2017)

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Lembaran Negara Nomor 3078 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sebagai lembaga yang independen KPI bertugas sebagai pengawasan media penyiaran, sedangkan media penyiaran terbagi atas dua peran yaitu, *Service Provider* dan *Content Provider*. Jadi diperlukan undang-undang telekomunikasi untuk mengawasi penyiaran dan undang-undang telekomunikasi sebagai penata penayairan.

Adapun indikator yang mengharuskan penyairan perlu diawasi yaitu:²⁹

- a. Efek dikontomi yaitu, efek media itu sendiri dan efek yang ditimbulkan kepada masyarakat seperti efek kognitif, afektif dan behavioral.
- b. Efek trikotomi yaitu, efek sasaran yang terdiri dari individual, interpersonal, dan sistem dalam bentuk kognitif, afektif, dan behavioral. Efek kognitif mempengaruhi pengetahuan, pemahaman dan persepsi masyarakat yang menyangkut keterampilan dan kepercayaan. Efek afektif mempengaruhi perasaan seperti perasaan senang dan benci yang menyangkut emosi, sikap dan nilai. Efek behaviorial menyangkut perilaku seperti pola tindakan dan kebiasaan.

Kedua efek tersebut mengakibatkan *Multiplier Effect* dan *Derivative Effect* yaitu meliputi efek ekonomis, efek sosial, efek penjadwalan kegiatan, efek penyaluran perasaan tertentu dan efek konsumsi media itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil poin ketiga atas kewenangan KPID Riau yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standart program siaran pada tv lokal di riau apakah telah ditaati oleh lembaga-lembaga tv diriau sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.

²⁹ Siti Karlinah, Komunikasi Massa, (Jakarta: Penerbitan UT, 1999), 8-7

Dalam menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran mempunyai wewenang dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran khususnya dalam mengawasi isi siaran televisi lokal yang ada di Riau, Komisi Penyiaran Indonesia berpegang teguh kepada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 35 dan 36 yang menyebutkan bahwa isi siaran sebagai berikut:³⁰

- a. Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
 - b. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
 - c. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
 - d. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- Isi siaran dilarang:
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

³⁰ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi siaran dilarang memperlakukan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Selain berpegang teguh terhadap UU No.32 tahun 2002 KPI juga mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012 dalam mengawasi penyiaran pasal 68 yaitu sebagai berikut :³¹

- a. Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% dan paling sedikit 60% untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan perhari.
- b. Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada waktu primetime waktu setempat.
- c. Program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

Sedangkan standar operasional prosedur KPID Riau memuat Ketentuan dalam P3 dan SPS 2012 Bagian III pasal 5 yang mungkin dilanggar sebagai berikut:³²

- nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan;
- nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- etika profesi;
- perlindungan kepada anak;
- perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- muatan seksual;
- muatan kekerasan;
- muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- muatan program siaran terkait perjudian;
- muatan mistik dan supranatural;

³¹ http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf

³² ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penggolongan program siaran;

bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;

sensor;

siaran iklan

Adapun sanksi bagi lembaga penyiaran terhadap pelanggaran isi siaran diatur dalam P3SPS pasal 75 sebagai berikut:³³

Teguran tertulis

Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu

Pembatasan durasi dan waktu siaran

Denda administrasi

e. Pembekuan kegiatan untuk sementara waktu

f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran

g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Selain UU No.32 Tahun 2002 dan P3SPS regulasi penyiaran juga diatur dalam PP No.50 Tahun 2005 pasal 36 yang tertulis sebagai berikut :

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, diatur sebagai berikut:³⁴

a. Induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi;

b. Anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota;

Untuk kesamaan acara, siaran stasiun jaringan dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke seluruh wilayah dalam satu provinsi;

Khusus untuk provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diizinkan mendirikan stasiun relai; Jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem stasiun jaringan dibatasi

³³ Ibid

³⁴ Peraturan Pemerintah, Dalam

https://ppid.kominfo.go.id/uploads/pp_no_50_th_2005.pdf. (diakses 7 Mei 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia;

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e memungkinkan terjangkaunya wilayah siaran menjadi paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang dimilikinya sehingga melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini;

Paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf e atau huruf f terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri;

- h. Penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan peraturan yang sudah dijelaskan diatas, standarisasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau) untuk mengawasi siaran televisi lokal yang ada di riau diukur melalui, UU No.32 Tahun 2002, P3SPS pasal 68 tahun 2012 dan PP No.50 Tahun 2005. Berdasarkan regulasi tersebut maka peneliti mengambil beberapa aspek yang akan diamati untuk mengukur berjalan atau tidaknya regulasi penyiaran televisi lokal yang ada di Riau yaitu sebagai berikut :

1. Isi Siaran

Pada aspek ini, peneliti mengamati seperti apakah isi siaran konten lokal televisi nasional ber jaringan yang disiarkan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan regulasi yang ada.

Metode Pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Pada aspek ini, peneliti mengamati metode pengawasan yang dilakukan oleh KPID Riau dalam mengawasi isi siaran Tv lokal di Riau.

3. Durasi dan Pola Siaran

Pada aspek ini, peneliti melihat dan membandingkan durasi dan pola siaran yang di tayangkan dengan durasi yang seharusnya dienuhi oleh siaran Tv lokal dan durasi serta pola pengawasan di KPID Riau.

4. Sarana untuk Mengawasi

Dalam aspek ini, peneliti melihat sarana atau fasilitas yang digunakan oleh KPID Riau dalam mengawasi isi siaran Tv lokal di Riau.

5. Upaya KPID Riau dalam Optimalisasi Siaran Lokal

Dalam aspek ini, peneliti mengamati upaya KPID Riau dalam optimalisasi siaran lokal melalui apresiasi (reward) dan juga sanksi (punishment) yang diberikan oleh KPID Riau kepada Stasiun Tv Lokal di Riau.

4. Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert.³⁵ dikatakan sebagai pergeseran dari teori liberal. Pergeseran yang dimaksud disini adalah teori liberal berawal dari kemerdekaan negatif yang dapat didefinisikan sebagai kebebasan dari pengekangan eksternal (pemerintah) yang sebelumnya berlaku dalam teori otoriter. Kebebasan dalam nuan negatif tersebut dalam negara demokratis kemudian bergeser menjadi teori tanggung jawab sosial yang berdasarkan pada kebebasan positif.

Dasar pemikiran utama dari teori ini adalah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan berkewajiban bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang hakiki .

Teori tanggung jawab sosial ini termasuk kedalam Four Theories of The Press yang terdiri dari: Teori Pers Otoriter, Teori Pers Liberal dan Teori Pers Komunis. Pada mulanya teori tanggung jawab sosial dan ketiga teori pers lainnya, memang merupakan teori pers, tetapi kemudian seiring dengan

³⁵Fred S. Siebert dalam Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal* (Yogyakarta: LKIS,2007)66

perkembangan media massa yang meliputi radio, televisi dan film, maka teori ini menjadi teori media massa. Dengan kata lain teori pers yang semula hanya teori pers dalam arti sempit kini menjadi pers dalam pengertian luas, tidak hanya sekedar media cetak tetapi juga media elektronik

Sebagaimana telah dikemukakan pada penjelasan diatas, dalam teori tanggung jawab sosial ini, media massa dalam melakukan aktivitasnya berkewajiban bertanggung jawab kepada masyarakat dengan menjalankan fungsi pers sebagaimana mestinya, fungsi pers menurut Fred S. Siebert yakni :³⁶

- a. Fungsi menyiarkan informasi: Untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau khalayak.
- b. Fungsi mempengaruhi: Untuk mempengaruhi baik secara eksplisit maupun implisit.
- c. Fungsi mendidik: Untuk mendidik khalayak, memang merupakan hal yang abstrak tetapi khalayak dapat merasakannya.
- d. Fungsi menghibur: Memberi hiburan kepada khalayak agar merasa senang dan terhibur, sehingga khalayak akan merasa senang dengan keberadaan media massa itu sendiri

5. Sistem Penyiaran

Ada beberapa sistem untuk menyebarluaskan siaran, yakni sebagai berikut³⁷:

a. Sistem Terestrial

Sistem ini memancarkan signal di atas permukaan tanah dengan menggunakan microwave. Pancaran SHF (Super High Frequency) harus bebas hambatan.

b. Sistem Satelit

Sistem penyiaran ini memerlukan bantuan satelit. Satelit komunikasi adalah satelit yang dipergunakan khusus untuk keperluan komunikasi. Satelit komunikasi ditempatkan di Geo Stasionary Orbitte atau Geo Synchronize (GSO). GSO adalah wilayah di luar angkasa setinggi 35.860 km di atas garis khatulistiwa. Satelit komunikasi yang terletak

³⁶ Ibid 66

³⁷ Rahmawati, dkk ,*Berkarir di Dunia Broadcast Televisi & Radio.*(Bekasi: Laskar Aksara, 2011)hal 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di GSO dapat meliputi sepertiga dunia. Dengan demikian untuk menghubungkan berbagai tempat di muka bumi diperlukan tiga satelit komunikasi.

Sistem Direct Broadcasting Satellite (DBS)

Prinsip dasar sistem DBS ini adalah daya pancar transponder satelit diperbesar dan pancaran diarahkan pada sasaran.

Sistem Kabel dan Serat Optik

Pada Sistem Kabel signal listrik disalurkan melalui kabel ke pesawat penerima. Dengan demikian antara stasiun TV dengan pelanggan dihubungkan dengan kabel. Sedangkan Sistem Serat Optik dipergunakan sebagai alternatif lain dari sistem satelit, karena kemampuan yang dimilikinya untuk menyalurkan signal. Untuk penyaluran signal melalui serat optik, frekuensi signal dimodulasikan dari VHF/UHF ke SHF sampai mendekati kecepatan cahaya. Kemudian signal SHF ini disalurkan melalui serat optik dengan sistem pantul. Selanjutnya ada juga Sistem Gabungan yaitu penggabungan beberapa sistem yang ada untuk keperluan siaran/penyiaran.

6. Televisi Lokal

Potensi stasiun televisi lokal beroperasi secara optimal cukup besar. Hal ini didukung Undang-Undang No 32/2002, Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Menurut Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005, penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran yang memiliki prinsip dasar keberagaman kepemilikan dan keberagaman program siaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu dalam pemberdayaan masyarakat daerah. Dengan semangat otonomi daerah, dampak dari kehadiran televisi lokal memberikan warna baru di dunia penyiaran tanah air karena selama ini kearifan lokal kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual.

Stasiun televisi lokal saat ini telah mendapat porsi tersendiri di hati masyarakat, bahkan tidak sedikit dari stasiun televisi lokal yang ada saat ini

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah masuk keranah televisi kabel, yang pada akhirnya juga disiarkan secara global. Dari sisi pasar atau target konsumen, Dominick mendefinisikan TV lokal sebagai berikut; “A local TV stasion provide television services to a particular community in the industry, these communities are customarily referred to a market”³⁸ Definisi ini menyatakan bahwa stasiun televisi lokal menyediakan layanan televisi bagi komunitas tertentu atau bersifat segmented, dan komunitas inilah yang menjadi lahan pasar televisi lokal. Definisi Dominick ini menyiratkan bahwa lokalitas dilihat dari sudut pandang target pemirsa, karena target pemirsanya yang terbatas itulah yang menyebabkan stasiun televisi tersebut mendapat batasan.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini , peneliti telah menelusuri beberapa literatur atau pustaka untuk memperkuat penulisan, sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting adalah pembahasan dan kajiannya tiak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Setyawan dan Lena Satlita dengan judul penelitian Efektivitas Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) Dalam Mengawasi Penyiaran Televisi di DIY. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dalam mengawasi penyiaran televisi di DIY, serta hambatan yang dihadapi oleh KPID DIY dalam melakukan pengawasan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah: efektivitas pengawasan KPID DIY dalam mengawasi penyiaran televisi di DIY masih belum berjalan secara efektif³⁹.

Penelitian yang dilakukan Deddy Zulkarnaen dengan judul efektivitas Pengawasan Penyiaran TV Kabel Berlangganan Oleh KPID Riau. Tujuan

³⁸ Joseph R.Dominick *The Dynamics of Mass Communication: Media in the. Digital Age* (Tenth Edition). New York: McGraw Hill. 2009) hal 275

³⁹ Ryan Setyawan dan Lena Satlita, *Efektivitas Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) Dalam Mengawasi Penyiaran Televisi di DIY*. 2016. Universitas Negeri Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemantauan siaran TV kabel berlangganan oleh KPID Riau dan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemantauan implementasi penyiaran berlangganan TV kabel oleh KPID Riau. Hasil penelitian menunjukkan model efektivitas pengawasan teknis yang dilaksanakan KPID Riau dalam pemantauan isi siaran mewajibkan setiap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan untuk memiliki Tripod pengawasan yaitu sensor internal lembaga penyiaran sebelum tayang dan wajib mendapat sertifikat dari lembaga lulus sensor dan mendapat pemantauan dan pengawasan KPID.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan Dede Mercy Rolando dengan judul penelitian Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016). Dengan rumusan masalah peran KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Siaran TV Lokal (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016). Hasil penelitian menunjukkan KPID Lampung memiliki peran menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak, membantu memperbaiki sistem penyiaran, melakukan pemantauan dan menindaklanjuti pelanggaran serta membina Tegar TV. Sehingga dari peran tersebut melahirkan proses yang dilakukan terhadap Tegar TV yaitu perencanaan, pengawasan, Tindakan dan pembinaan. Ke empat proses tersebut masuk kedalam jenis dan sifat pengawasan preventif, pengawasan concurrent control dan pengawasan respresif. Pengawasan tersebut diketahui cukup efisien dan efektif saat digunakan pada proses pengawasan Tegar TV.⁴¹

Penelitian yang dilakukan Nur Fathin Luaylik dan Nanik Kusumiati Hudaya dengan judul Implementasi Fungsi Pengawasan Penyiaran Program Musik Dangdut oleh KPID Jawa Timur. Tujuan penelitian untuk menganalisa mengenai eksistensi KPID Jawa Timur terhadap pemberian porsi alokasi penyiaran program musik. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor

⁴⁰ Dede Zulkarnain. *efektivitas Pengawasan Penyiaran TV KABEL Berlangganan Oleh KPID Riau*. Universitas Riau. Pekanbaru. 2013.

⁴¹ Dede Mercy Rolando. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat dalam implementasi UU No. 32 tahun 2002 yaitu keterbatasan berbagai sarana prasarana sehingga implementasi berjalan hanya dengan mengandalkan sumber daya yang ada ⁴²

Penelitian yang dilakukan Febri Eko Prasetyo dengan judul Peran Komunikasi dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur dalam Melakukan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Samarinda.. Dengan rumusan masalah bagaimana peran komunikasi dalam mengoptimalkan KPID Kalimantan Timur dalam melakukan pembinaan pengawasan lembaga penyiaran di Samarinda. Hasil penelitian KPID Kaltim akan mengetahui peran komunikasi yang dilakukan kepada lembaga penyiaran di Samarinda dari bentuk preventif atau preventif, pengawasan dalam prosesnya, yaitu pengawasan yang terjadi setiap saat dan pengawasan represif dengan tindakan apa yang dilakukan saat lembaga penyiaran dilanggar ⁴³.

Penelitian yang dilakukan Rizkiyuni Juninda dengan judul Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung Dalam Pengawasan dan Penerapan Regulasi Isi Siaran Televisi Nasional Berjaringan di Lampung (Studi Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung). Dengan rumusan masalah melihat bagaimanakah pelaksanaan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung dalam mengawasi penerapan regulasi isi siaran konten daerah pada televisi nasional berjaringan di Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPID Lampung sebagian besar pengawasannya belum berperan dengan maksimal, terutama pada aspek pengawasan terhadap isi, sdm, durasi dan jam siar, serta sarana pengawasan di kantor KPID Lampung. Serta belum maksimalnya peran KPID Lampung dalam mengawasi televisi nasional berjaringan ditandai dengan berbagai kondisi diantaranya, kurangnya sanksi

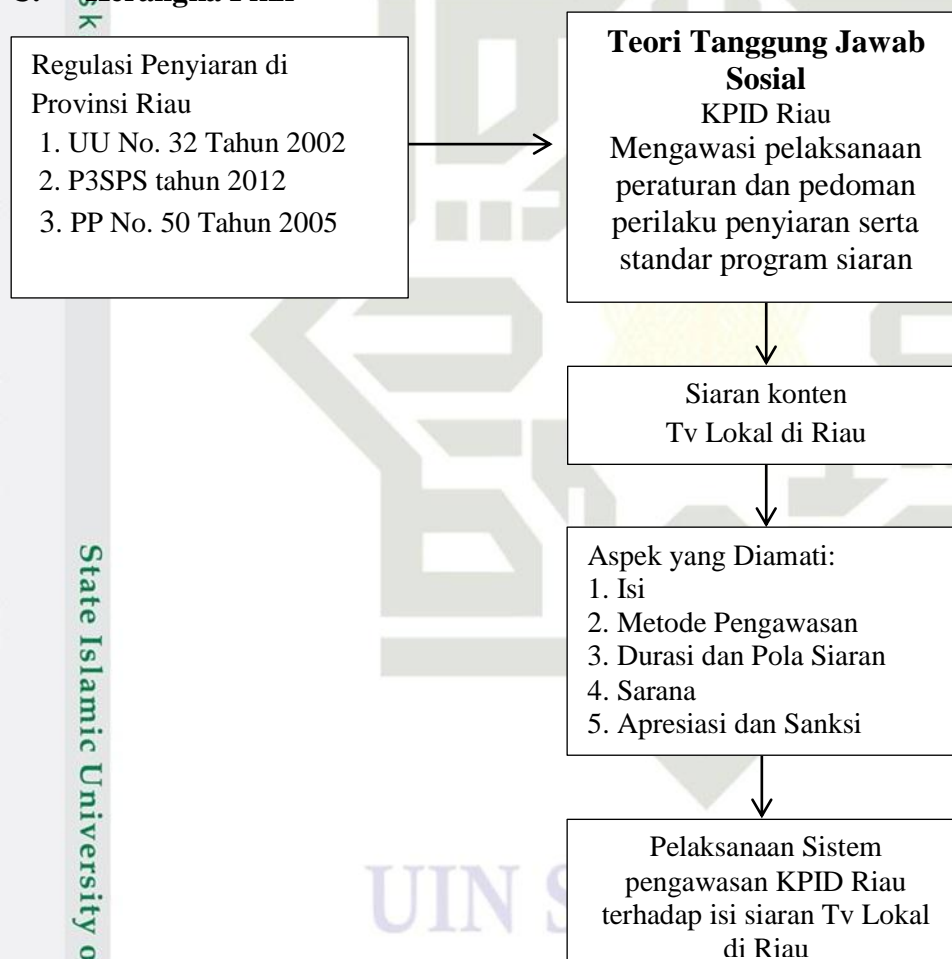
⁴² Nur Fathin Luaylik dan Nanik Kusumiati Hudaya. *Implementasi Fungsi Pengawasan Penyiaran Program Musik Dangdut oleh KPID Jawa Timur*. REFORMASI. Volume 8 Nomor 2 (2018). ISSN 2407-6864.

⁴³ Febri Eko Prasetyo. *Peran Komunikasi dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur dalam Melakukan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Samarinda*. eJournal Ilmu Komunikasi, 2017, 5 (4): 41-55 ISSN 2502-5961

yang tegas terhadap televisi nasional berjaringan di Lampung, yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada⁴⁴.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengambil objek Tv lokal Riau dan dalam penelitian ini mengambil beberapa aspek yang akan diamati untuk mengukur berjalan atau tidaknya regulasi penyiaran televisi lokal yang ada di Riau yaitu isi siaran, metode pengawasan, durasi dan Pola Siaran, sarana untuk mengawasi, dan upaya KPID Riau dalam Optimalisasi Siaran Lokal

C. Kerangka Pikir



(Sumber: Modifikasi Penelitian Rizkiyuni Juninda (2018))

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁴ Rizkiyuni Juninda. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung Dalam Pengawasan dan Penerapan Regulasi Isi Siaran Televisi Nasional Berjaringan di Lampung (Studi Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada halaman pertama bab II penulis telah menggambarkan kerangka pikir dalam penelitian Sistem Pengawasan KPID Riau terhadap Isi Siaran Tv Lokal di Riau. Dalam penelitian ini diawal dijelaskan adanya regulasi pengawasan isi siaran Tv lokal yang tertulis dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur seluruh lembaga penyiaran agar mematuhi aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya, serta adapun Peraturan Pemerintah yang diatur dalam PP No.50 Tahun 2005, Dan kesemua peraturan tersebut diatur oleh lembaga pemerintah yaitu Komisi penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, lembaga tersebut mempunyai Tugas, Fungsi, dan Pengawasan terhadap penerapan regulasi isi siaran Televisi. Selain itu, aturan ini juga dituangkan pada Pasal 68 Program Lokal Dalam Sistem Stasiun Jaringan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012.

Selanjutnya, peneliti akan melihat bagaimana siaran Tv Lokal di Riau, dimana KPID Riau sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang ada di daerah Riau, mempunyai fungsi secara umum untuk mengawasi penerapan penyiaran apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau sebaliknya. Adapun regulasi isi siaran yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2002.

Selain aturan-aturan tersebut, KPID Riau juga membuat standarisasi lain untuk menilai apakah televisi berjaringan tersebut melanggar atau tidak regulasi isi siaran Tv lokal. KPID Riau hanya mengacu kepada regulasi-regulasi tersebut, dan tidak ada aturan-aturan ataupun kriteria dan standarisasi lain yang digunakan oleh pihak KPID Riau dalam mengawasi Tv lokal yang ada di Riau.

Aspek-aspek yang dilihat dari adanya penelitian ini adalah pengawasan regulasi yang mengatur Tv lokal ini adalah sebagai berikut:

1. Isi siaran konten lokal seperti apa yang di tayangkan oleh Tv lokal di Riau.
2. Metode Pengawasan seperti apa yang ada di KPID Riau, terutama pada Bidang Pengawasan televisi Lokal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

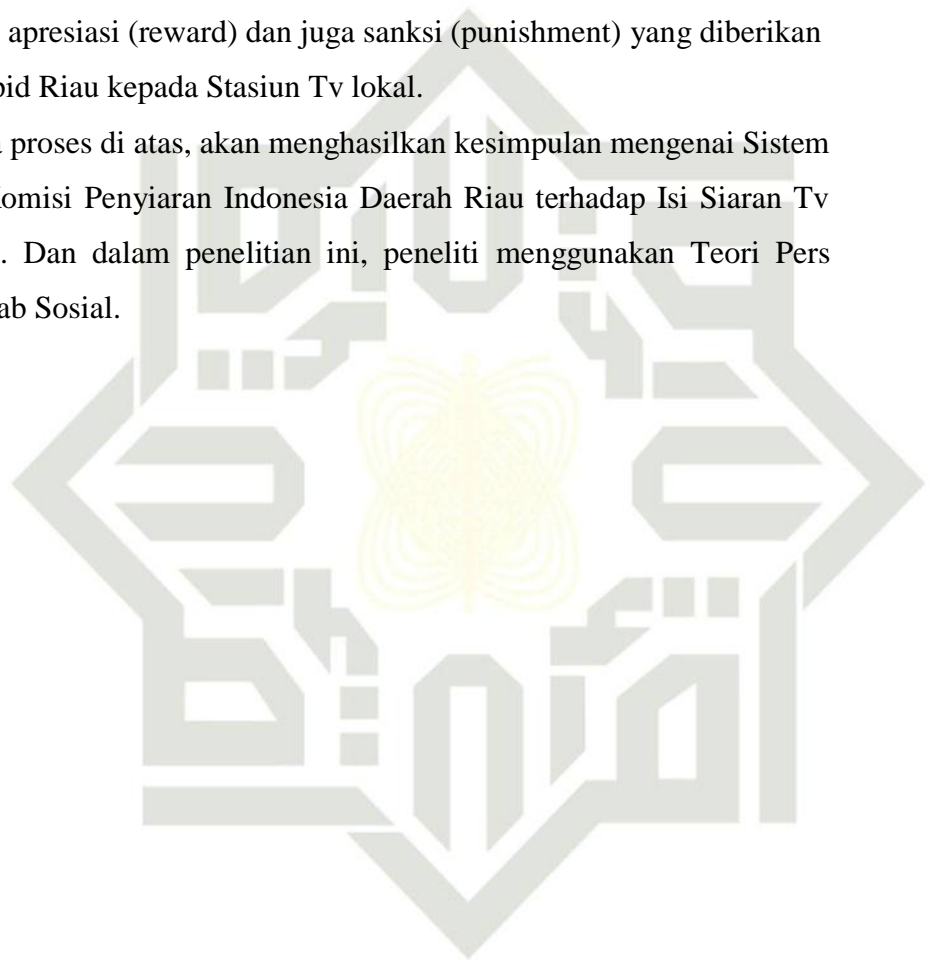
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana pengawasan yang digunakan oleh KPID Riau dalam mengawasi isi siaran konten Tv lokal.

Durasi dan pola siaran konten lokal, apakah sudah mencakup waktu siaran yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPID Riau.

Peneliti mengamati upaya KPID Riau dalam optimalisasi siaran lokal melalui apresiasi (reward) dan juga sanksi (punishment) yang diberikan oleh Kpid Riau kepada Stasiun Tv lokal.

Dari adanya proses di atas, akan menghasilkan kesimpulan mengenai Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Isi Siaran Tv Lokal di Riau. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Peneliti akan berusaha mendeskripsikan pengawasan KPID Riau dalam artian menggambarkan data kemudian melakukan analisis dari data yang telah diperoleh agar tergambar secara jelas sistem pengawasan KPID Riau terhadap isi siaran tv lokal di Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang beralamat di Jl. Gaja Mada Simpang Empat Kota Pekanbaru.

C. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh dilapangan yaitu semua data-data yang berkaitan dengan sistem pengawasan Tv Lokal yang bersumber dari bidang pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari observasi, kepustakaan berupa buku-buku dari dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Informan berfungsi untuk menjawab pertanyaan siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan kepada Komisi KPID Riau, dan informan data diperoleh dari :

1. Ketua KPID Riau
2. Bidang Pengawasan Isi Siaran
3. Anggota dan staff KPID Riau
4. General Manager Bidang Redaksi, Program dan Teknik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang lengkap dilapangan, penulis menggunakan metode yaitu :

a. Metode Interview

Metode Lexy J. Moleong, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang diperoleh melalui catatan tertulis atau menggunakan perekam video atau audio tapes, mengambil foto, atau film.⁴⁵ Wawancara itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk menggali fakta, alasan dan opini atas sebuah peristiwa baik yang sudah, sedang, maupun akan berlangsung.

b. Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁶

Keunggulan metode ini adalah data dikumpulkan dalam dua bentuk yaitu interaksi dan percakapan (conversation) Artinya selain perilaku nonverbal juga mencakup perilaku verbal dari orang-orang yang diamati.⁴⁷

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data . metode observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.⁴⁸

F. Validitas Data

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis triangulasi, yaitu menganalisis jawaban

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (PT.Remaja Rosdakarya,2004)hal 157

⁴⁶ Husein Umar, *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)51

⁴⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta;Kencana,2010)hal 110-111

⁴⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta;Kencana,2006)hal 120

subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris yang tersedia.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, yaitu Membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman, dimana dijelaskan bahwa analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu :⁵⁰

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hak yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang sudah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penyajian data ini seluruh data-data lapangan yang berupa hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisa sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang sistem pengawasan KPID Riau terhadap siaran Tv Lokal di Riau.

c. Conclusion Drawing/ Verification

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

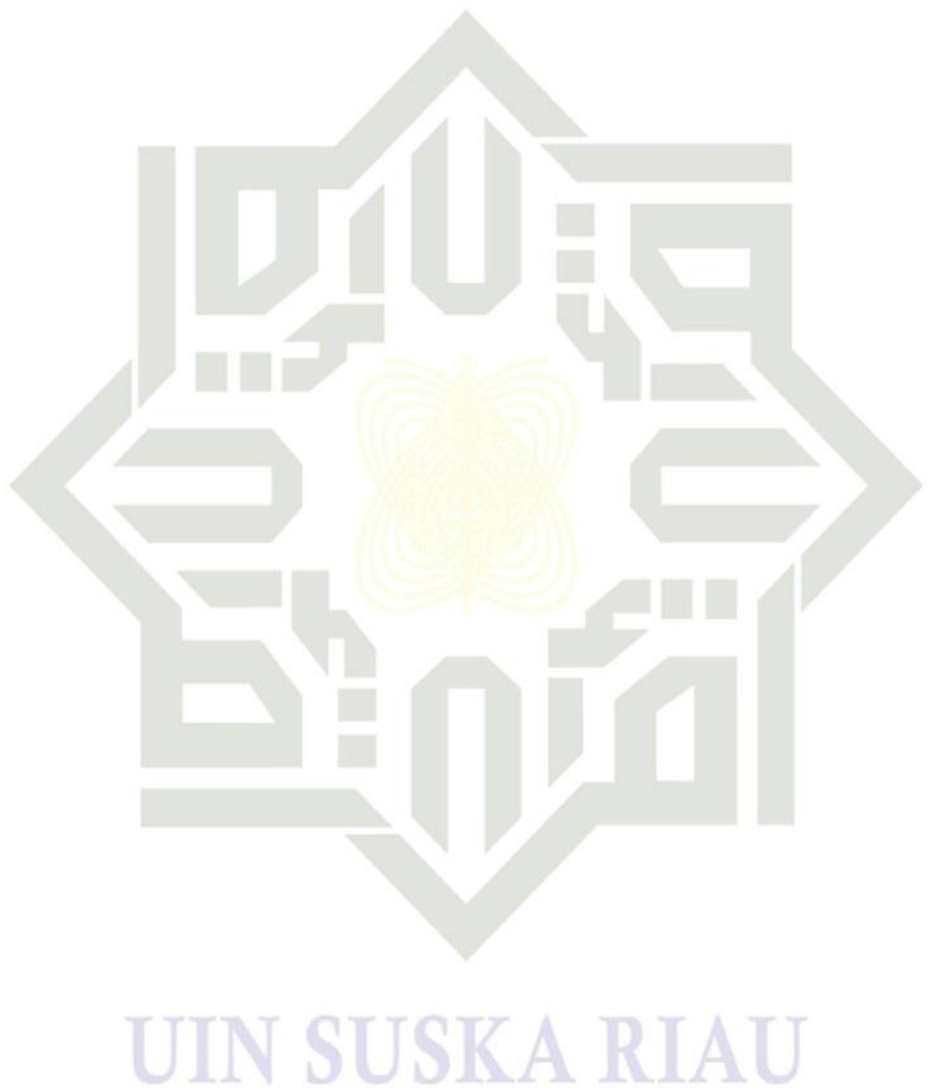
⁴⁹ Ibid hal 72

⁵⁰ Sugioni, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 92

sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Dasar Pembentukan KPID Riau

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran ditingkat daerah. Dasar pembentukannya adalah undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas KPI Pusat yang berada ditingkat pusat KPI Daerah berada ditingkat provinsi dengan masa tiga tahun setiap periode.⁵¹

Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya, anggota KPI Daerah berjumlah 7 orang yang berkoordinasi dengan KPI Pusat yang beranggota 9 anggota komisioner. Didalam undang-undang Tahun 2002 disebutkan KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi setempat.⁵²

Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.⁵³ Artinya KPID diperlukan karena spektrum frekuensi radio sumber daya alam yang terbatas yang harus dilindungi dan dijaga oleh negara.

Sejak diberlakukannya Undang-undang 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia telah terbentuk ditingkat pusat dan setelah delapan tahun terbentuknya KPI Pusat barulah KPID Riau dibentuk, komisioner periode pertama ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh Gubernur Riau masa itu Rusli Zainal.⁵⁴

Komisioner KPID Riau periode 2010-2013 berasal dari berbagai latar belakang, antara lain dari kalangan akademis, jurnalis dan juga praktisi

⁵¹ Laporan Tahunan KPID Riau Tahun 2018

⁵² Ibid

⁵³ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran*.

⁵⁴ Laporan Tahunan KPID Riau Tahun 2018

penyiaran. Pada tahun 2013 masa berlaku jabatan komisioner KPID Riau berakhir. Dan melalui seleksi oleh DPRD Riau terpilihlah komisioner periode kedua pada desember 2013. Dan pada periode ketiga tepatnya januari 2017, komisioner terpilih kembali . komisioner KPID Riau periode 2017-2020 saat ini diantaranya Falzan Surahman sebagai ketua yang merangkap anggota kelembagaan, Hisam Setiawan sebagai wakil ketua merangkap anggota bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, Asril Darma sebagai koordinator bidang pengawasan isi siaran, M. Asrar rais sebagai koordinator bidang kelembagaan, Warsito sebagai koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, Widde Munadir Rossa dan Nopri Naldi sebagai anggota bidang pengawasan isi siaran.⁵⁵



Gambar 4.1 Komisioner KPID Riau periode ketiga tahun 2017-2020

⁵⁵ Laporan Tahunan KPID Riau Tahun 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPID Riau memiliki beberapa tugas yakni menyangkut beberapa bidang sebagai berikut⁵⁶:

a. Bidang Perizinan

Pengawasan perizinan Televisi dan Radio menjadi aktivitas utama bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran atau lebih dikenal dengan bidang perizinan. Hal tersebut menjadi agenda penting guna tercapainya target kinerja KPID Riau dan pengembangan database perizinan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau.

b. Bidang Pengawasan Isi Siaran

Pemantauan isi siaran TV dan Radio dan pengawasan langsung siaran TV Kabel menjadi tugas utama bidang pengawasan isi siaran, selain pemantauan isi siaran langsung juga dilakukan melalui peralatan pemantau yang ada di kantor KPID Riau yang dipantau langsung oleh tim pemantau.

c. Bidang Kelembagaan

Penguatan organisasi menjadi tugas bidang kelembagaan, diantaranya Diskusi Ahli yang membentuk Keluarga Cinta Siaran Indonesia khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dalam rangka penguatan wilayah perbatasan dan kerja sama antar lembaga serta penyebaran informasi tentang tugas dan fungsi KPID Riau.

Fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip inilah yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI dan KPID.⁵⁷

Maka sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengantar independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksud adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.⁵⁸



Gambar 4.2 Logo KPID Riau

B. Visi KPID Riau

VISI terwujudnya sistem penyiaran yang sehat, adil dan berkualitas di Provinsi Riau.⁵⁹

Sehat

- Lembaga Penyiaran patuh dan taat terhadap aturan, terutama soal perizinan
- Transparansi atas data perizinan lembaga penyiaran
- Dukungan atas layanan yang prima demi terciptanya iklim industri penyiaran yang sehat
- Prioritas, lembaga penyiaran publik (LPP) Lokal/ Radio & TV pemerintah daerah

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adil

- a. *Diversity of content & Diversity of Ownership* terwujud, baik melalui Komunitas & Pemda
- b. Riau wilayah perbatasan, menjaga keutuhan NKRI (Luberan Asing)
- c. (Konten Lokal) sistem penyiaran dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berkualitas

- a. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan isi siaran
- b. Membangun kelembagaan KPID yang handal & profesional
- c. Program siaran yang cerdas dan mencerdaskan, ramah anak, sesuai dengan kaidah P3SPS
- d. Terciptanya sumber daya manusia penyiaran yang profesional

C. Misi KPID Riau

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran.
2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesional penyiaran
3. Membangun kelembagaan KPI dan Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan siaran
4. Meningkatkan kapasitas sekretariat KPI

D. Kelembagaan Organisasi KPID Riau

1. Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPID Riau
 KPID Riau melakukan peran-perannya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi inspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPID Riau juga memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 8, yaitu :⁶⁰

⁶⁰ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Menetapkan standar program siaran.
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS menjadi rujukan untuk melihat kualitas penyelenggaraan di Indonesia. Dalam arti kualitas tersebut apakah penyelenggaraan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tercantum didalamnya.

KPI/KPID juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁶¹

- a. KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- b. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.

⁶¹ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran*.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c. KPI wajib menindak lanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf e.
 - d. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberi kesempatan hak jawab.
 - e. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang terkait.

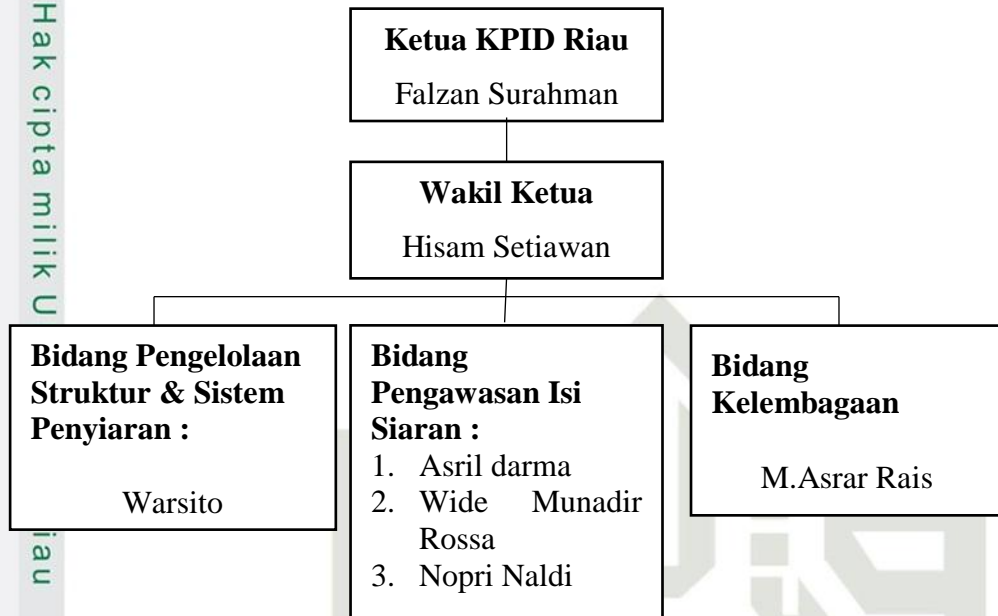
2. Struktur Organisasi Pengurus KPID Riau

KPID RIAU Periode 2017 - 2020 Dilantik pada 12 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Gubernur Riau, dan telah menetapkan 7 orang sebagai Komisioner.⁶²

Ketua	: Falzan Surahman
Wakil Ketua	: Hisam Setiawan
Korbid Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran	: Warsito
Korbid Pengawasan Isi Siaran	: Asril Darma
Anggota	: Wide Munadir Rossa
Anggota	: Nopri Naldi
Korbid Kelembagaan	: M.Asrar Rais

⁶² Laporan Kinerja KPID Riau Tahun 2018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPID Riau

3. Alamat KPID Riau

KPID Riau beralamatkan di jalan Jl. Gajah Mada Simpang Empat Kota Pekanbaru, Riau

Website : www.kpid.riau.go.id

Email : info.kpidriau@gmail.com

Twitter : @KPIDaerahRiau

Instagram : KPID Riau

HalamanFacebook : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah – KPID Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam bab ini penulis mengemukakan sistem pengawasan KPID Riau berdasarkan hasil penelitian aspek yang diamati yaitu:

1. Isi siaran tv lokal di Riau masih memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dan masih ada pelanggaran yang dilakukan tv lokal pada isi siarannya tetapi masih tergolong minim.
2. Metode pengawasan yang dilakukan KPID Riau terhadap Tv Lokal merupakan metode pengawasan tidak langsung yaitu dengan menggunakan alat pemantau yang ada di Kantor KPID, disamping itu KPID juga menyediakan kolom pengaduan masyarakat, serta menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twiter*, *email*, dll. Metode pengawasan yang dilakukan oleh KPID Riau sudah sesuai dengan SOP pengawasan isi siaran. . Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi metode pengawasan KPID Riau dimana frekuensi keterbatasan daya alat tangkap di kantor KPID Riau sulit , jumlah personalpun belum memadai, sehingga untuk Tv lokal yang jangkauannya jauh sistem pengawasannya masih tergolong minim dan dalam pengawasan terhadap Tv Lokal, KPID Riau juga mempunyai hambatan, baik alat pemantau dan jam kerja yang terbatas.
3. Durasi dan pola isi siaran KPID Riau tidak memiliki wewenang dalam pengawasan durasi dan pola penyiaran, hal ini disebabkan masing-masing Tv lokal memproduksi sendiri program lokal.
4. Sarana yang digunakan KPID Riau untuk mengawasi isi siaran Tv Lokal menggunakan sarana pengawasan antara lain ruangan pengawasan, alat pemantau yang disertai dengan alat perekam dan monitor. Namun sarana pengawasan tersebut memiliki keterbatasan, dimana tidak dapat menjangkau Tv Lokal yang jauh, kemudian keterbatasan jam kerja dimana pengawasan tidak dapat dilakukan selama 24 jam, hal ini karena

© keterbatasan personal, keterbatasan teknologi dan anggaran juga merupakan faktor penghambat bagi KPID Riau dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran Tv Lokal di Riau

5. Apresiasi kepada Tv Lokal di Riau, KPID memberikan penghargaan setiap tahunnya, yaitu diadakannya KPID Riau Award yang merupakan penghargaan bagi Tv Lokal yang berupaya menyuguhkan program yang menghibur namun tetap sehat, berkualitas dan mendidik. Disamping itu KPID juga memberikan sanksi bagi Tv Lokal yang melakukan pelanggaran isi siaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU Penyiaran No.32 tahun 2002 dan P3SPS.

Sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Isi Siaran Tv Lokal di Riau dilihat dari ke lima aspek yang diamati yaitu Pelaksanaan sistem Pengawasan KPID Riau terhadap Isi Siaran menggunakan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dan dalam melakukan pengawasan KPID Riau mengikuti langkah-langkah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemantau isi siaran.

B. Saran

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan diantaranya:

1. Bagi KPID Riau Diharapkan membuat program pengawasan yang lebih maksimal dan melengkapi peralatan pengawasan sehingga setiap pengawasan dilakukan di daerah semakin maksimal
2. Bagi Tv lokal yang ada di Provinsi Riau, dalam menayangkan program acara harus memenuhi aturan yang berlaku dalam penyiaran sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar dan mendapat teguran dari KPID Riau.
3. Masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam mengamati dan mengkritik setiap program yang ditayangkan Tv Lokal yang ada di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dede Mercy Rolando. 2018. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dede Zulkarnain. 2013. *efektivitas Pengawasan Penyiaran TV KABEL Berlangganan Oleh KPID Riau*. Universitas Riau. Pekanbaru.
3. Devikharism. 2015 *Jenis Penyiaran Indonesia*". Dalam <https://devikharism.wordpress.com/2015/02/25/4-Jenis-Penyiaran-Indonesia/>. (diakses 10 maret 2019)
4. Elvinaro Ardianto dkk.2007. *Komunikasi Massa* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
5. Febri Eko Prasetyo.2017. *Peran Komunikasi dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur dalam Melakukan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Samarinda*. eJournal Ilmu Komunikasi, 2017, 5 (4): 41-55 ISSN 2502-5961
6. Fred S. Siebert dalam Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal* Yogyakarta: LKIS.
7. Husein Umar. 20014.*Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
8. Ismail Nawawi. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya :CV. Putera Media Nusantara.
9. Joseph R.Dominick 2009. *The Dynamics of Mass Communication: Media in the Digital Age (Tenth Edition)*. New York: McGraw Hill. 2009.
10. Laporan Kinerja KPID Riau Tahun 2018
11. Lexy J. Moleong. 2004 *Metodelogi Penelitian Kuanlitatif*. Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya.
12. M. Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
13. Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*.Yogyakarta: LKIS.
14. Morissan. 2013 *Teori Komu nikasi Individu Hingga massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



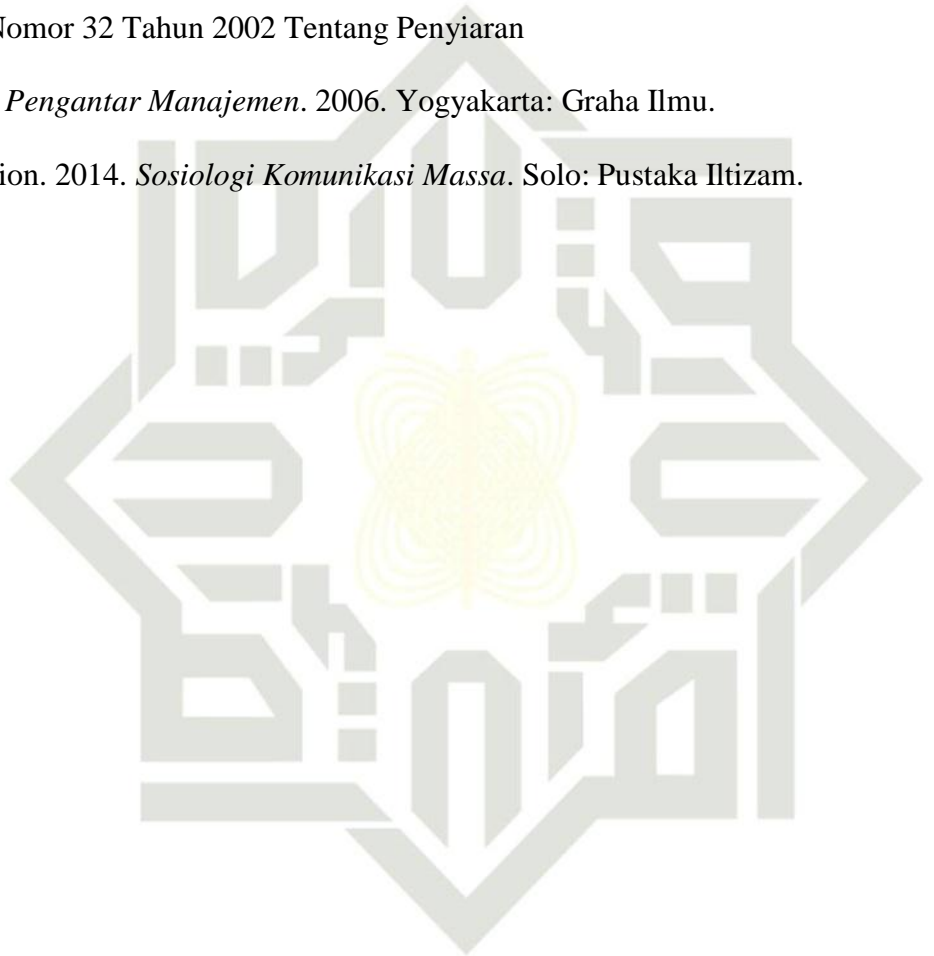
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- _____ 2009. *Teori Komunikasi Organisasi* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____ 2008. *Manajemen. Media Penyiaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nelly Muhriani. 2014. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, *Jurnal Vol.3, No.10* (Oktober 2015) 72.
- Nur Fathin Luaylik dan Nanik Kusumiati Hudaya. 2014. *Implementasi Fungsi Pengawasan Penyiaran Program Musik Dangdut oleh KPID Jawa Timur*. REFORMASI. Volume 8 Nomor 2 (2018). ISSN 2407-6864.
- Onong Uchjana Effendy. 2017. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* Bandung: Remaja Rosda.
- _____. 2006. *Dinamika Komunikasi*. 2006. Bandung: Remaja Rosda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005
- Rachmat Kriyantono. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta; Kencana.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Lembaran Negara Nomor 3078 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 102
- Rizkiyanti Juninda. 2018. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung Dalam Pengawasan dan Penerapan Regulasi Isi Siaran Televisi Nasional Berjaringan di Lampung (Studi Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ryan Setyawan dan Lena Satlita, 2016. *Efektivitas Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) Dalam Mengawasi Penyiaran Televisi di DIY*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sarbiyati, Neneng Lina. 2011. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sondang P. Siagian. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab* Jakarta: Sinar Grafika.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sukanto Reksohadiprodjo. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5*, Yogyakarta: BPFE
- Utami, Tata. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005. *Kamus Besar bahasa Indonesia*(Jakarta:Balai Pustaka.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*. 2006. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulkarnaen Nasution. 2014. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Solo: Pustaka Iltizam.



UNDANG- UNDANG NO.32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Pasal 7

Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.

KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

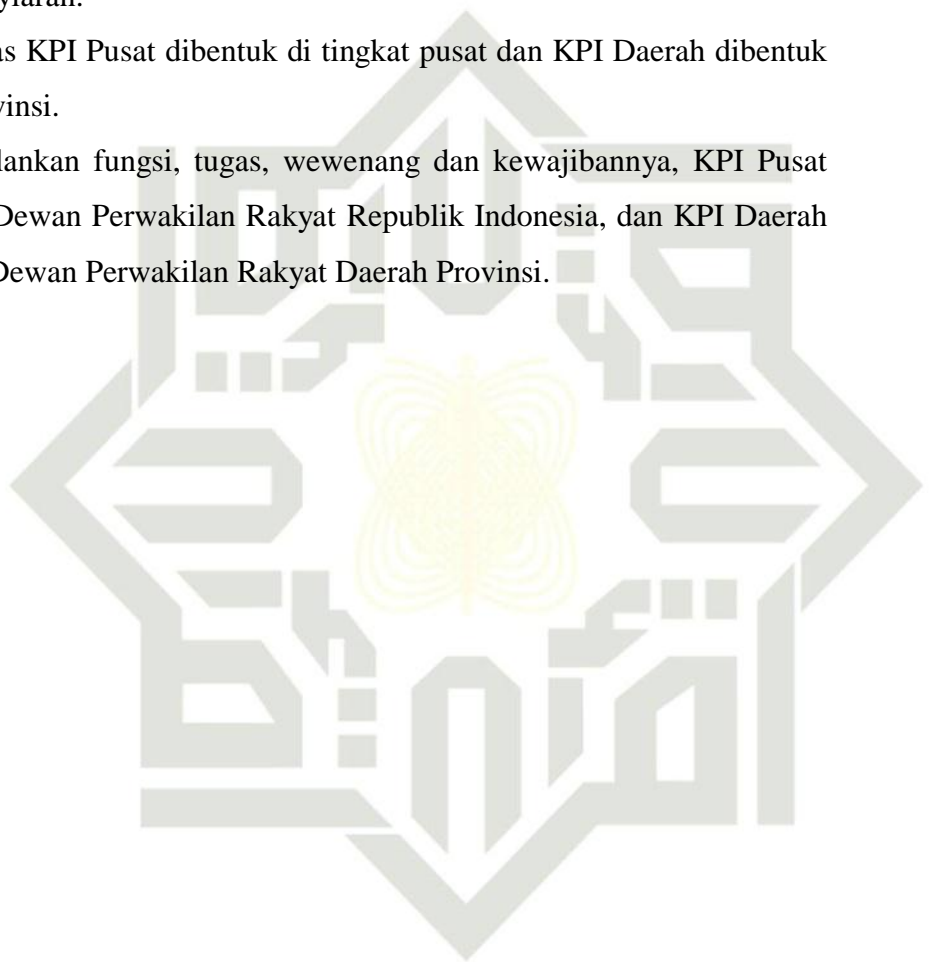
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UNDANG- UNDANG NO.32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Pasal 8

Ayat 2

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Ayat 3

KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDANG- UNDANG NO.32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5. Isi siaran dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN dan STANDAR PROGRAM SIARAN Tahun 2012

Bagian III

Pasal 5

Standar Program Siaran merupakan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan;
- b. norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. program layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;
- h. perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu;
- i. muatan seksualitas;
- j. muatan kekerasan;
- k. larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. larangan dan pembatasan muatan perjudian;
- m. larangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. program siaran jurnalistik;
- p. hak siar;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. sensor;
- s. program siaran berlangganan;
- t. siaran iklan;
- u. program asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- x. muatan kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lain;
- y. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- z. pengawasan, sosialisasi, dan rekaman;
- aa. sanksi dan penanggungjawab; dan
- ab. sanksi administratif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN dan STANDAR PROGRAM SIARAN Tahun 2012

Pasal 68

1. Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjarangan per hari.
 2. Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.
 3. Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjarangan per hari.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN dan STANDAR PROGRAM
SIARAN Tahun 2012
Pasal 75**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.
2. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
 - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN 2005

Pasal 36

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, diatur sebagai berikut:

- a. induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi;
- b. anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota;
- c. untuk kesamaan acara, siaran stasiun jaringan dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke seluruh wilayah dalam satu provinsi;
- d. Khusus untuk provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diizinkan mendirikan stasiun relai;
- e. jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia;
- f. pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e memungkinkan terjangkaunya wilayah siaran menjadi paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang dimilikinya sehingga melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini;
- g. paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf e atau huruf f terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri;
- h. penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Jabatan :

Masa Kerja :

B. Pertanyaan

Untuk KPID Riau

1. Bagaimana isi siaran tv lokal yang ada di Riau? dan apakah isi siaran sudah sesuai?
 Jawab

2. Sistem pengawasan apa saja yang digunakan KPID Riau untuk mengawasi penyiaran Tv Lokal di Riau?
 Jawab

3. Apa saja faktor yang menghambat sistem pengawasan tersebut ?
 Jawab

4. Apakah durasi dan pola penyiaran Tv lokal di Riau sudah sesuai dan memenuhi syarat yang ditetapkan KPID Riau ?
 Jawab

5. Apakah ada apresiasi yang diberikan KPID untuk penyiaran TV lokal di Riau? Dalam bentuk apa?
 Jawab

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah ada sangsi yang diberikan KPID untuk penyiaran TV lokal di Riau?

Jawab

.....

.....

.....

Untuk Tv Lokal

1. Sebagai salah satu Tv Lokal yang ada di Riau apakah RTV memiliki program yang dibuat khusus untuk lokal ?

Jawab

.....

.....

Sebagai GM RTv bagaimana menurut bapak pengawasan yang dilakukan oleh KPID Riau terhadap siaran Tv lokal, apakah sudah efektif ?

Jawab

.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

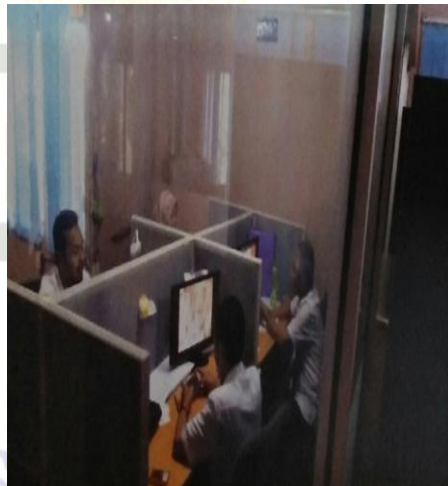
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara



2. Foto Alat Perekam



3. Petugas Pemantau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 16 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1064 Telp. 0781-562223
Fax. 0781-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sg@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/411/2019

Pekanbaru, 24 Jumadil Awal 1440 H

Sifat : Biasa

30 Januari 2019 M

Lampiran: 1 berkas

Hal : Penunjukan Pembimbing

a.n. **Sri Lestari**

Kepada Yth.

Dr. Nurdin, MA

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n **Sri Lestari** NIM. 11543200615 dengan judul "**Sistem Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Riau terhadap Isi Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel di Riau**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Nurdin, MA

NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
2. Ketua Jurusan Komunikasi
3. Mahasiswa ybs

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/24106

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.00.9/4753/2019 Tanggal 26 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SRI LESTARI |
| 2. NIM / KTP | : 11543200615 |
| 3. Program Studi | : ILMU KOMUNIKASI |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : SISTEM PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU TERHADAP ISI SIARAN TV LOKAL DI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH RIAU**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 124/KPID-Riau/XI/2019

Menindak lanjuti surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24106 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dengan data sebagai berikut :

Nama	: SRI LESTARI
NIM	: 11543200615
Program studi	: Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru

Sehubungan dengan surat tersebut bahwa nama diatas telah menyelesaikan Penelitian di KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU terhitung mulai tanggal 09 Juli 2019 s/d 09 September 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan penuh pertimbangan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 November 2019

Ketua,



H. FALZAN SURAHMAN, S.Si

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH RIAU

Pekanbaru, 22 Juli 2019

Nomor : 074 /KPID-Riau/VII/2019
Lamp : 1 Lembar
Perihal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth:
Pimpinan PT. Riau Media Televisi

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Seiring salam dan doa semoga Bapak/Ibu selalu dilimpahkan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Sehubungan dengan temuan tayangan yang terindikasi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditayangkan stasiun RTV tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.00-13.30 WIB dalam judul program " Ongol - Ongol" sebagaimana terlampir.

Dengan hal ini kami bermaksud memanggil Bapak untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019
Pukul : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor KPID Riau Komplek Gedung KPU Prov. Riau
Lantai III Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru – Riau
Agenda : Klarifikasi dari Lembaga Penyiaran atas temuan ini

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

H. FALZAN SURAHMAN, S.Si

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH RIAU**

TEMUAN

Hari / Tanggal : Rabu 17 Juli 2019
 Topik : Komedi
 Judul Program : Orgol - Orgol
 Tanggal Tayang Program : 17 Juli 2019
 Jam Tayang Program : 13.00 - 13.30
 Stasiun TV atau Radio : Rtv
 Indikasi :

Menampilkan Seorang komedian yang sedang memegang rokok.
 Pria berbaju biru.
 Jam 13.25
 P3 : Pasal 11 ayat 1 . Pasal 18
 SPS : 27 (2.a)

TINDAKAN

: Dipanggil Untuk klarifikasi Tgl 24/7-2019

Saksi : Teguran Lisan.

Pemantau

2

(BATHUL PATTAM)



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Sri Lestari**, adalah putri pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Poniman dan Ibunda Sujina. Lahir di Balam Sempurna pada tanggal 22 Desember 1997. Penulis mengawali jenjang pendidikan pada tahun 2004 di Taman Kanak-kanak Harapan Kasih Rohil dan selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri 015 Balam Sempurna dan selesai pada tahun 2010, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 07 Balam Sempurna dan selesai pada tahun 2013, lalu melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 04 Bangko Pusako dan selesai pada tahun 2015. Dan melanjutkan Sekolah perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 2015-2019. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata KKN di Menggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir pada tahun 2018, dan kemudian pada tahun 2019 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dengan mengikuti ujian Munaqasah/ Skripsi serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.